







# ANALISA

## KEBUDAYAAN SEBAGAI FAKTOR KEKUATAN



Handwritten title or header at the top of the page, possibly "L. 1111".

First line of handwritten text in the upper section.

Second line of handwritten text in the upper section.

Third line of handwritten text in the upper section.

Fourth line of handwritten text in the upper section.

Fifth line of handwritten text in the upper section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text or signature in the bottom left corner.

Handwritten text in the bottom center.

Handwritten text in the bottom right corner.

## PENGANTAR PENERBIT

Selama dua tahun terakhir ini masalah sosio-budaya kerap kali dipersoalkan di dalam pembahasan-pembahasan tentang pembangunan nasional. Tidak jarang diajukan satu pendapat bahwa bidang sosio-budaya kurang mendapat perhatian di dalam usaha pembangunan masyarakat, padahal pembangunan itu pada hakekatnya adalah satu proses budaya. Akan tetapi nampaknya hal ini lebih mudah dikemukakan dan cukup sukar untuk dipecahkan. Karena berkenaan dengan dilancarkannya tekanan-tekanan atas pentingnya dimensi budaya di dalam pembangunan tersebut, serentak pula timbul pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut: -bagaimanakah hubungan antara pembangunan masyarakat dan kebudayaan? -dimanakah tempat bidang sosio-budaya di dalam pembangunan? -bagaimanakah hubungan yang sehat antara bidang ekonomi dan non-ekonomi? Dan selanjutnya tentu saja satu pertanyaan besar: apakah itu politik kebudayaan? -bagaimanakah dirumuskan satu strategi sosio-budaya sebagai bagian di dalam strategi besar pembangunan nasional?

Itulah sebabnya maka ANALISA kali ini memuat beberapa pemikiran yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas. A.M.W. PRANARKA di dalam artikel PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH PROSES AKULTURASI mencoba memberikan satu ulasan mengenai hubungan antara kebudayaan dengan pembangunan: apakah maksudnya bila kita mengatakan pembangunan adalah satu proses budaya. Dikemukakan bahwa dengan menyebut pembangunan sebagai satu proses kebudayaan berarti kita menempatkan pembangunan di dalam konteks manusia. Berdasarkan pada asumsi ini lebih lanjut ditekankan betapa pentingnya kita menempatkan titik berat pemikiran kita kepada subyek pembangunan. Masih di dalam alam permasalahan yang sama maka Daoud JOESOEF menyajikan karangan tentang ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA. Dikemukakan di sini bagaimanakah relasi antara dimensi ekonomi dan non-ekonomi harus kita pandang di dalam pembangunan. Sementara itu di dalam tulisannya yang berjudul MENGEJAR KELAMBATAN BUDAYA, J. Soedjati DJIWANDONO membuat satu ulasan mengenai soal sekitar dimensi ekonomi dan non-ekonomi juga.

Kemudian daripada itu bila orang membahas masalah kebudayaan, ia selalu akan harus berhadapan dengan masalah pendidikan dan masalah generasi muda. Untuk itu maka A.M.W. PRANARKA dan Onny S. PRIYONO mengemukakan pemikiran dan ulasan masing-masing di dalam tulisan berjudul AKIBAT-AKIBAT DARI TERLAMBATNYA PROSES PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA dan KELAKUAN YANG MENYIMPANG TIDAK SELALU BERSIFAT NEGATIF. Pendidikan merupakan perangkat yang pokok di dalam proses kebudayaan. Sebagaimana Indonesia telah berjalan melewati triadis 'Pendidikan - Kebangkitan Nasional - Kemerdekaan Republik Indonesia', maka ini perlu diteruskan lebih lanjut dengan satu triadis baru: 'Kemerdekaan Republik Indonesia - Pendidikan - Pembangunan Masyarakat Indonesia Baru'. Sementara itu untuk mengembangkan generasi muda sebagai kekuatan sejarah nasional, baiklah kita memahami pola-pola tingkah laku. Hal ini adalah sangat penting di dalam proses mendidik dan mengembangkan para remaja. Kita harus dapat membedakan hal-hal yang sungguh-sungguh negatif dan hal-hal yang belum tentu bersifat negatif. Pengertian kita akan kenyataan ini sangat penting untuk mencapai perkembangan manusia yang sehat dan mantap.

Jakarta, Oktober 1974

C.S.I.S.



# DAFTAR ISI

	<u>Hal.</u>
<u>Pengantar Penerbit</u>	i
<u>Pembangunan Nasional adalah Proses Akulturasi</u> A.M.W. PRANARKA	3
<u>Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan</u> <u>Ekonomi Indonesia</u> Daoud JOESOEF	9
<u>Mengojar Kelambatan Budaya</u> J. Soedjati DJIWANDONO	13
<u>Akibat-akibat dari Terlambatnya Proses</u> <u>Pembaharuan Pendidikan di Indonesia</u> A.M.W. PRANARKA	19
<u>Kelakuan Yang Menyimpang Tidak Selalu</u> <u>Bersifat Negatif</u> Onny S. PRIYONO	25

---

Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Tanah Abang III/27, Jakarta







## PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH PROSES AKULTURASI

A.M.W. PRANARKA

### Pemmasalahannya

Sudah sejak lima tahun yang lalu kita dilibatkan dengan debat dan kontroversi mengenai pembangunan nasional. Pada tahun 1968 orang masih bertanya-tanya: apakah pembangunan nasional ini benar-benar satu tekad yang sesungguhnya, ataukah sekedar satu issue politik semata-mata. Dalam tahun itu masih terdapat juga pertentangan-pertentangan mengenai manakah yang harus didahulukan: pembangunan ekonomi, ataukah perombakan pola dan struktur politik negara.

Setahun kemudian, pada tahun 1969, ketika PELITA I diputuskan pelaksanaannya, banyak diadakan debat dan diskusi sekitar hakekat dari pembangunan itu sendiri. Apakah itu pembangunan nasional? Apakah kriteria dan pedoman-pedoman pembangunan? Bagaimanakah pembangunan harus direncanakan? Masyarakat macam apakah yang kita cita-citakan? Orang berbincang-bincang mengenai soal-soal fundamental di dalam pembangunan nasional. Issue-issue utama antara lain adalah: modernisasi, sekularisasi, westernisasi, industrialisasi, pola tradisional dan sebagainya.

Pada tahun 1971, belum lagi jawaban-jawaban mantap bisa dirumuskan, telah timbul satu kontroversi lain lagi. Tema utama di dalam waktu ini adalah pola dan struktur politik serta tata pemerintahan. Soal yang dilontarkan adalah: apakah sistim politik, sistim tata pemerintahan dan sistim kepemimpinan yang ada di Indonesia ini akan memungkinkan terwujudnya pembangunan nasional yang nyata. Issue-issue pokok adalah: clean government, korupsi, kepartaian, dwifungsi ABRI, partisipasi rakyat, demokrasi serta hak-hak azasi dan negara hukum. Sementara itu banyak dibahas pula hambatan-hambatan kultural untuk pembangunan, khususnya hambatan-hambatan mental.

Sementara itu, pada tahun 1972-1973, tersebar lagi debat-debat baru mengenai pembangunan. Banyak dipersoalkan mengenai kegagalan atau salah arah pembangunan selama PELITA I. Kritik-

kritik bermunculan di mana-mana. Issue-issue terpenting adalah: soal sistim pembangunan, asumsi pembangunan nasional, metode dan approach pembangunan, keadilan sosial dan pemerataan serta tentang model-model pembangunan.

Demikianlah selama lima tahun terakhir telah terjadi berbagai debat dan kontroversi. Ada yang bercorak fundamental, ada yang bersifat methodologis, ada yang bersifat politis maupun kulturil. Ada yang berkenaan dengan dasar-dasar metode perencanaan pembangunan nasional, ada tentang orientasinya, dan ada pula yang menyangkut pelaksanaan pembangunan itu.

Begitu cepatnya issue dan materi di dalam proses kontroversi itu sehingga kita lebih dijenuhkan dengan problematik pembangunan daripada diringankan dengan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya. Analisa yang kami ajukan ini, tidaklah dimasukkan untuk lebih memperberat problematik, melainkan ingin mencoba menelaah gejala-gejala kontroversi tersebut, dan mencoba memberikan satu titik tolak dan serta merta juga satu titik temu dari berbagai pikiran yang sudah bermunculan itu.

Pokok pikiran yang kami kemukakan adalah: bahwa pembangunan nasional adalah satu proses akulturasi. Dengan pokok pikiran ini kami harap bisa sedikit menjernihkan persoalan-persoalan yang fundamental, yang methodologis maupun yang bersangkutan dengan masalah pelaksanaannya. Segala debat dan kontroversi yang jujur biasanya berkecenderungan menokankan salah satu dimensi dari pembangunan nasional. Bahaya terbesar dari kenyataan ini adalah terjadinya proses absolutisasi dari kenyataan-kenyataan yang pada dasarnya sepihak itu. Sedang bahaya yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila kompleksitas problematik pembangunan tersebut dieksploitir oleh interesse-interesse politik, dan sasaran utama justru 'mementahkan kembali secara terus-menerus' gerak pembangunan yang sudah digariskan bersama. Di dalam kenyataan ini maka diperlukan titik synthesa di mana dimungkinkan komunikasi dari aliran-aliran yang ada, dan dengan demikian ditemukan pedoman-pedoman yang lebih definitif dan lebih konstruktif.

### Mengapa akulturasi

Mengapa digunakan faham akulturasi? Bukankah akulturasi terjadi apabila terdapat pertemuan antara dua kebudayaan atau lebih? Apakah pembangunan nasional dengan demikian lebih dilihat



sebagai satu proses kebudayaan, dan apakah dengan demikian orientasi pragmatis kepada pembangunan ekonomi harus dilepaskan.

Memang akulturasi mengandaikan adanya pertemuan antara dua pola kebudayaan atau lebih. Dan memang pembangunan nasional merupakan usaha mempertemukan antara dua pola sosial budaya. Akan tetapi untuk tidak segera mengambil kesimpulan yang gegabah, perlulah memberikan beberapa ulasan mengenai faham akulturasi dan hubungannya dengan pembangunan.

Pembangunan sosial, di manapun jura akan merupakan pembangunan dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Manusia adalah sangkan dan sorta merta paran pembangunan. Dengan vokabuler Aristoteles, maka bisa dikatakan bahwa manusia adalah: *causa efficiens* dan sorta merta juga *causa finalis* di dalam pembangunan.

Akan tetapi manusia yang terlibat dengan pembangunan itu selalu adalah manusia yang konkrit: di dalam dunia, di dalam sejarah. Manusia - dunia - sejarah adalah aspek-aspek pokok di dalam segala proses pembangunan. Pembangunan adalah interaksi antara manusia dengan manusia, interaksi antara manusia dengan dunia dan semua ini terjadi di dalam sejarah. Berbicara secara lebih jelas dan konkrit lagi maka di dalam pembangunan nasional ini yang kita bicarakan adalah: manusia Indonesia, dengan alam dunia Indonesia, di dalam perkembangan sejarah Indonesia ini. Dengan demikian jelas harus dipertimbangkan juga segala tuntutan sosial maupun tuntutan perkembangan sejarah, tidak hanya nasional tetapi juga internasional.

Yang penting dari pikiran ini adalah bahwa kita menemukan subyek utama dari proses pembangunan tersebut. Hal ini teramat penting sebab tidak jarang terjadi satu fallacy dengan mengadakan obyektivasi dari pembangunan: kita menempatkan pembangunan sebagai sesuatu yang terletak di luar subyek pembangunan itu, yang harus dikejar, tetapi tanpa melihat bahwa pembangunan itu juga sesuatu yang intrinsik di dalam subyek sendiri. Fallacy ini membawa banyak akibat yang pada pokoknya akan menyebabkan proses pembangunan itu justru dialienasikan dari subyek utamanya. Dan di dalam faham akulturasi, ditegaskannya subyek ini secara definitif adalah sesuatu hal yang sangat penting dan prinsipil. Banyak debat dan kontroversi mengenai pembangunan justru disibukkan dengan hal-hal di luar subyek utama ini, dan dengan demikian sukarlah ditemukan titik temu baik secara teoritis maupun secara praktisnya.

Kesimpulan lain yang perlu ditarik dari pangkal pikiran di atas adalah bahwa pembangunan sosial meminta dikembangkan-nya kekuatan-kekuatan di luar manusia (alam, natural resources) maupun kekuatan-kekuatan di dalam diri manusia (within the human resources). Manusia merupakan salah satu kekuatan yang harus dikembangkan, sebab manusia adalah faktor atau subyek yang harus mengemban pembangunan itu.

Subyek utama pembangunan nasional adalah manusia-manusia Indonesia yang sudah disatukan di dalam satu entitas politik negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai satu entitas adalah subyek pembangunan nasional. Untuk mencapai perwujudan pembangunan itu maka harus dikembangkan kekuatan-kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan manusia di Indonesia sebagai satu entitas tersebut. Untuk ini maka populasi merupakan faktor strategis di dalam proses pembangunan tersebut. Subyek riil dari pembangunan nasional sesungguhnya adalah penduduk Indonesia ini.

Itulah sebabnya maka proses pembangunan nasional jelas harus disertai dengan satu kebijaksanaan kependudukan. Tetapi ini harus diartikan secara luas, baik secara struktural kuantitatif maupun secara kultural kualitatif. Mengembangkan penduduk Indonesia menjadi subyek-subyek utama (sebagai kekuatan strategis) di dalam proses pembangunan, itulah dapat dinamakan satu politik kebudayaan dalam arti makro. Penduduk adalah subyek utama di dalam proses akulturasi.

Bila kita telah temukan subyek proses pembangunan (dan juga subyek proses akulturasi) maka harus dipikirkan bahwa pembangunan selalu menginginkan perubahan, ingin mewujudkan hal-hal yang baru. Pertemuan antara apa yang ada dengan hal-hal baru yang diinginkan, itulah satu proses akulturasi. Sebab yang dimaksud bukan terjadinya proses di mana subyek-subyek utama itu menjadi hilang (satu proses konflik yang menghasilkan peleburan) akan tetapi yang diinginkan adalah satu proses di mana subyek-subyek itu mengembangkan diri, memperkaya diri, memajukan diri. Inilah arti pokok dari faham akulturasi. Bukan hapusnya subyek utama di dalam perubahan-perubahan sosial itu, melainkan dimajukan subyek tersebut. Menjadikan penduduk Indonesia faktor yang strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia baru (secara struktural maupun secara kultural) itulah arah proses akulturasi. Dan itulah arah pokok pula di dalam proses pembangunan.



Mungkin ada pertanyaan: bagaimanakah kemudian hubungan antara faham akulturasi ini dengan tuntutan perkembangan ekonomi dan teknologi? Kami kira faham akulturasi akan memberikan titik temu. Sebab akulturasi selalu merupakan satu proses yang konkrit. Dan di dalam perkembangan riil dewasa ini, maupun untuk masa depan Indonesia, jelas perlu sekali bahwa Indonesia, sebagai subyek utama pembangunan itu, harus berkembang tidak hanya sebagai satu entitas politik, tetapi juga harus menjadi satu entitas ekonomi, menuju satu komunitas ekonomi baru. Tentu saja terwujudnya komunitas ekonomi baru itu tetap akan harus berpijak pada azas: dari rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia, dan untuk rakyat Indonesia. Dan population policy sangat penting untuk mewujudkan kenyataan yang dicita-citakan itu. Dengan perkataan lain: faham akulturasi bertitik tolak dari penduduk Indonesia sebagai subyek utama pembangunan nasional. Faham akulturasi selanjutnya harus diikuti dengan perencanaan akulturasi yaitu bagaimanakah membuat populasi Indonesia menjadi kekuatan strategis di dalam menghadapi tuntutan sosial dan tantangan sejarah, antara lain harus menjadi kekuatan Indonesia sebagai satu komunitas ekonomi dan komunitas teknologi.

#### Mengatasi berbagai fallacies

Fallacy adalah kekeliruan di dalam cara berpikir. Ia bukan kesalahan total, tetapi bisa menjurus ke arah kesalahan total tersebut. Salah satu fallacy yang sudah kami kemukakan adalah: mengalienasikan pembangunan dari subyek utamanya, karena pembangunan telah diobyektivasikan, padahal pembangunan adalah sesuatu yang berjalanan dengan subyek tersebut. Pembangunan bukanlah sesuatu di luar subyek, melainkan sesuatu yang harus diciptakan, dikerjakan oleh subyek pembangunan.

Fallacy tersebut juga membawa akibat bahwa banyak diskusi-diskusi mengenai pembangunan terlalu suka membahas pengertian-pengertian seperti modernisasi, sekularisasi, westernisasi sebagai sesuatu yang terlepas dari struktur maupun kultur rakyat Indonesia. Sekulturisasi kiranya jelas satu faham yang mempunyai latar belakang yang berlainan dengan pola struktural dan kulturil Indonesia, meskipun sebagai gejala kemanusiaan mempunyai titik portemuannya pula. Dengan faham westernisasi

jelas nampak proses alienasi pembangunan nasional. Dan dengan modernisasi, tanpa menempatkannya di dalam konteks akulturasi, juga akan membawa akibat alienasi.

Fallacy lain yang kerap terjadi adalah fallacy kesopihakan, pars prototo atau 'one-sidedness'. Inilah kiranya yang telah mengakibatkan banyak perdebatan sekitar economic dan non-economic approach, serta bermacam perdebatan lain mengenai prioritas. Pastilah sebagai annihilasi dari aspek-aspek lain. Faham akulturasi memberikan titik temu atau jembatan komunikasi dengan mengemukakan bahwa baik non-economic maupun economic-approach, semuanya adalah dari satu subyek dan untuk satu subyek, yaitu rakyat Indonesia dan negara Indonesia sebagai satu entitas.

### Penutup

Apa yang harus ditemukan adalah titik temu dari berbagai approach dan komunikasi antara berbagai metode pembangunan sosial. Memang pada dasarnya satu proses pembangunan adalah kompleks. Tetapi ini harus diartikan bahwa kita perlu menemukan sistimatik yang jelas dan konsisten di dalam usaha memecahkan dan mewujudkannya. Dengan faham akulturasi ingin dikemukakan titik temu tersebut, terutama dengan menegaskan subyek utama dari proses pembangunan, dan membuat supaya pembangunan tidak dialienasikan dari subyeknya itu. Secara konkrit faham akulturasi ingin membuat penduduk Indonesia sebagai kekuatan strategis di dalam proses pembangunan.

Dengan demikian maka yang harus dipikirkan adalah: bagaimanakah Indonesia bisa merencanakan proses akulturasi itu? Apakah isi dari proses akulturasi itu. Dan bagaimana bisa digerakkan dan dipimpin satu proses akulturasi ini secara sehat. Inilah kiranya masalah-masalah yang perlu dipikirkan lebih lanjut.



## ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Daoud JOESOEF

Berkat tulisan-tulisan dan penerangan yang selama ini dilakukan secara intensif, kiranya dapat dikatakan bahwa setiap orang mengetahui bahwa salah satu faktor penting yang menentukan jalannya pembangunan ekonomi adalah "modal". Sayangnya di sini modal seringkali ditanggapi dalam artian materiil, baik uang maupun fisik. Bukankah setiap hari orang mendengar pernyataan betapa kredit diperlukan bagi dunia bisnis dalam jumlah yang semakin lama semakin besar. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari orang melihat betapa meluas-tidaknya sesuatu aktifitas produktif erat hubungannya dengan besar-kecilnya tersedia peralatan masinal, dari "hardware" yang paling sederhana seperti alat bubut sampai rangkaian mesin-motor-energi yang sebagai keseluruhan merupakan satu pabrik.

Kiranya kurang disadari bahwa ada modal lain yang tidak kalah pentingnya dari modal materiil tersebut di atas bagi jalannya pembangunan ekonomi, yaitu "kebudayaan". Bila dipandang dari sudut warga masyarakat perscorangan, kebudayaan dapat diartikan sebagai perkembangan kesanggupan mental, termasuk di dalamnya keseluruhan elemen artistik, sastra lisan dan tulisan serta pengetahuan ilmiah yang membantu perkembangan tersebut. Berhubung dengan ini, bila dipandang dari sudut masyarakat sebagai keseluruhan, kebudayaan adalah modal spirituil dan inteletuil yang, di satu pihak, tumbuh di dalam perjalanan masyarakat dan, di lain pihak, mendorong perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sini kiranya menjadi jelas betapa diperlukannya satu politik kebudayaan yang aktif, dalam artian politik yang tidak hanya ditujukan ke arah penggunaan, walaupun tidak pemerasan, secara maksimum atas modal-kebudayaan domi mendapatkan daripadanya sumbangan yang sebesar-besarnya kepada pembangunan ekonomi, tetapi juga satu politik yang ditujukan ke arah pengembangan kebudayaan atau soseditnya guna memcegah supaya modal-kebudayaan ini tidak menyusut, secara perlahan-lahan tetapi pasti.

Salah satu cara yang terbukti telah menggerogoti kebudayaan adalah mekanisme di mana peranan manusia semakin lama semakin direduksi hanya sebagai konsumen dan penonton berhubungan kekuasaan mesin-mesin dibiarkan semakin lama semakin besar di dalam proses pembangunan ekonomi. Bila demikian salah satu bentuk politik kebudayaan yang aktif guna melawan mekanisme yang serata-mata ditujukan ke arah menaikkan G.N.P. "at all costs" adalah pemberian training massal ke arah penguasaan teknologi dan industrial arts. Artinya menggunakan pengetahuan ilmiah di dalam usaha memberikan efektifitas yang tinggi kepada tenaga manusia. Dengan perkataan lain, satu politik kebudayaan yang bertujuan mempercepat evolusi suatu corak kehidupan dan satu sistem ekonomi di mana prioritas diberikan kepada perlindungan, pengembangan dan penggunaan yang maksimum terhadap satu-satunya sumber (resource) yang praktis dimiliki oleh setiap warga masyarakat, yaitu tenaga ataupun energi manusia. Jadi satu politik yang membantu warga masyarakat untuk dapat menarik keberuntungan yang sebesar-besarnya dari tenaga yang diberikan alam kepadanya, yang membantunya untuk menjadi bangga atas hidupnya berhubung ia adalah produsen dan dapat berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembangunan ekonomi masyarakatnya.

Politik kebudayaan yang aktif seperti diuraikan di atas secara tidak langsung membantu memecahkan masalah sosial dari pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan kita adalah tidak hanya menciptakan satu masyarakat yang makmur baik materiil dan spirituil tetapi juga satu masyarakat yang adil. Bila dibawa ke bidang ekonomi, azas keadilan ini sering diartikan serata-mata sebagai keharusan membagi pendapatan secara merata. Dengan tidak ke luar dari bidang ekonomi, azas keadilan kiranya juga dapat dilaksanakan secara lain, yaitu dengan jalan menggunakan sumber yang praktis dimiliki oleh setiap warga, dalam hal ini energi manusia, seperti disebut di atas. Memang proses produksi modern tidak dapat menggunakan energi manusia begitu saja. Maka itu energi itu perlu dibina agar dapat memenuhi persyaratan elementer yang diminta melalui training yang praktis terbuka bagi setiap orang yang memerlukannya. Usaha mencapai azas keadilan dengan jalan seperti ini kami kira lebih positif dari usaha pembagian pendapatan yang lebih merata karena ia lebih bersifat mendidik dan lebih melayani arti martabat dan harga diri manusia, yaitu makhluk yang sekaligus merupakan pendukung dan pengolah kebudayaan.



Berhubung politik kebudayaan yang aktif seperti disebut di atas mau tidak mau menyinggung aspek sosial dari pembangunan ekonomi maka sampai tingkat tertentu diperlukan pula adanya satu politik sosial yang relevant. Tidak boleh dilupakan bahwa training massal ke arah penguasaan teknologi dan industrial arts tidak hanya berakibat menaikkan persediaan modal manusia di dalam ekonomi kita. Ia juga berakibat memperpanjang masa-kesanggupan-kerja rata-rata (average working lifespan) warga masyarakat yang pasti menimbulkan persoalan baru di bidang penggantian tenaga atau di bidang penempatan tenaga baru, menambah dan memperbesar masalah yang sudah ada sebagai akibat perpanjangan masa-hidup rata-rata (average lifespan) karena kemajuan di bidang hygienis. Selain dari ini, politik sosial yang aktif juga diperlukan karena satu hal yang fundamental. Yaitu, dengan politik training-teknologis massal tersebut, kita menciptakan satu jenis pekerja baru, yaitu pekerja otak (knowledge worker), dengan perkataan lain, lambat tetapi pasti, kita menciptakan suatu masyarakat-otak (knowledge society). Berhubung dengan ini kita, melalui satu politik sosial yang aktif, harus sudah bersiap-siap untuk dapat mengatur masyarakat yang seperti itu, yang pasti lain sekali dari cara mengatur satu masyarakat tradisional seperti selama ini telah kita kenal dengan baik. Kiranya perlu disadari bahwa pekerja-otak, berbeda halnya dengan pekerja-tangan, tidak hanya puas dengan pekerjaan yang memberikan nafkah-hidup. Mereka perlu dimotivir secara lain, mereka tidak menerima begitu saja dimasuk-masukkan ke dalam kotak-kotak hierarkhis dari organisasi bentukan masa-lalu. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat memikirkan bentuk-bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang baru, bentuk hubungan horizontal dan vertikal yang baru, yang sesuai dengan type baru dari individu yang membentuk masyarakat masa depan itu.

Bila pemasalahannya memang demikian maka para penguasa, terutama para pejabat yang diberi wewenang untuk merumuskan rencana pembangunan, di dalam merumuskan politik sosial yang aktif harus sesedikitnya meminta sumbangan pikiran dari ahli sosiologi, politik dan kebudayaan. Menganggap diri serba-tahu dan karenanya menutup mata dan telinga terhadap analisa dan pendapat orang lain, semata-mata karena kenyataan bahwa ia telah diberi wewenang tersebut, pasti akan meratakan jalan bagi satu kegaduhan sosial dan politik.





## MENGEJAR KELAMBATAN BUDAYA

J. Soedjati DJIWANDONO

Sudah oringkali kita dengar keluhan-keluhan selama ini bahwa pembangunan nasional yang telah kita laksanakan melalui Pelita I terlalu berat sebelah, terlalu menitikberatkan bidang ekonomi dan kurang memperhatikan bidang-bidang politik dan sosial-budaya. Sebagai akibatnya timbulah kepincangan-kepincangan dalam masyarakat yang pada gilirannya menimbulkan kegoncangan-kegoncangan. Kurang meratanya hasil pembangunan ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat melebarkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, yang memperkuat perasaan-perasaan frustrasi dan tak bordova di antara rakyat banyak yang melihat dengan kesal kemowahan hidup segolongan kecil yang kaya. Apalagi pembangunan ekonomi dengan aparat pemerintahan sebagai pelaksana yang masih dihindangi mental "mumpung" dan mental korup nampak masih tetap menciptakan kelas orang-orang kaya mendadak dengan jalan-jalan menyclowong.

Dalam bidang politik kita saksikan cetusan-cetusan perasaan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, dalam kegiatan dan tanggung jawab pembangunan berupa partisipasi dalam perumusan rencana pembangunan; kekecewaan-kekecewaan karena kurangnya komunikasi antara pihak penguasa dan masyarakat dan karena sifat tertutupnya pemerintah serta kurang pekaanya terhadap koreksi-koreksi, kritik-kritik, dan kontrol dari lapisan bawah, bahkan lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat-pun telah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Di samping itu kita masih merasakan terbelengainya masalah pendidikan yang belum jelas arah dan tujuannya, banyaknya anak-anak yang tidak tertampung di sekolah-sekolah yang sebagian hanya menambah jumlah pengangguran dan masalah-masalah sosial lainnya. Kita dengar keluhan-keluhan tentang adanya pengaruh negatif daripada beberapa aspek kebudayaan asing, sedang pertumbuhan kebudayaan nasional belum jelas benar arahnya, bahkan kadang-kadang usaha-usaha untuk membina kebudayaan nasional dan memupuk kepribadian nasional memberi kesan akan dihidup-hidupkannya kembali aspek-aspek yang berbau feodal dan kolonial yang sebenarnya sama-sama tidak kita kehendaki.

Kita akui pada umumnya bahwa kemajuan-kemajuan ekonomi sedikit banyak memang terasa ada. Tetapi sayang bahwa kemajuan-kemajuan dalam bidang itu belum lagi diimbangi dengan kemajuan di bidang mental pada umumnya sehingga seringkali terasa benar ketidakcorasian antara kemajuan ekonomi itu dengan keseluruhan cara hidup rakyat kita. Lagi pula kemajuan ekonomi betapapun sedikitnya menimbulkan tuntutan-tuntutan yang semakin meningkat sehingga tumbuhlah suatu pola konsumsi yang tidak tepat yang pada akhirnya menghilangkan arti kemajuan itu sendiri.

Meskipun demikian jolas tidak relevant lagi, kurang realistis dan terlalu bersifat akademis semata-mata untuk mempersoalkan apakah masyarakat kita telah benar-benar siap untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, dan apakah tidak sebaiknya lebih dahulu kita melaksanakan pembangunan dalam bidang-bidang di luar ekonomi sekaligus mempersiapkan diri untuk pada waktunya memulai pembangunan ekonomi. Memperdebatkan masalah itu kita akan ketinggalan kereta api.

Masalah yang lebih relevant pada waktu ini kelihatannya ialah apakah dengan pengalaman di masa yang baru lalu dengan pelaksanaan Polita I yang terlalu menitikberatkan pembangunan ekonomi dengan segala akibat dan konsekwensinya yang negatif kini kita harus memindahkan titik berat pembangunan pada bidang-bidang di luar ekonomi, ataukah seperti telah dicantumkan dalam GBHN terus mengutamakan pembangunan pada bidang ekonomi sedang pembangunan di bidang-bidang lain untuk menunjang pembangunan ekonomi itu, tetapi mungkin dengan memberi perhatian lebih besar pada bidang-bidang itu, ataukah harus disusun pola pembangunan masing-masing bidang politik dan sosial-budaya di samping pembangunan ekonomi.

Pembangunan nasional yang kita laksanakan memang bukanlah semata-mata pembangunan ekonomi, bukan semata-mata bertujuan untuk mengejar kesejahteraan materiil. Cita-cita yang hendak kita capai dengan usaha-usaha pembangunan adalah terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam arti materiil dan spirituil sekaligus. Meskipun demikian, betapapun kelemahan-kelemahan daripada suatu pola pembangunan yang menitikberatkan bidang ekonomi dengan segala kemungkinan akibat negatif dalam bidang-bidang lain sehingga mengurangi arti daripada kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan yang demikian, kiranya akan terlalu sulit untuk mengambil alternatif yang sebaliknya dengan mengalihkan prioritas pembangunan pada bidang-



bidang non-ekonomis. Kesulitan utama dalam hal ini akan disebabkan oleh sulitnya diukur taraf kesejahteraan yang non-materiil sifatnya sehingga sulit ditentukan sasaran-sasaran yang nyata dalam penyusunan suatu rencana pembangunan yang mengutamakan bidang-bidang non-ekonomis, khususnya bidang politik dan sosial-budaya. Tentu saja secara teknis tidak akan terlalu sulit untuk dalam beberapa hal menentukan sasaran-sasaran nyata seperti misalnya berapa jumlah pusat-pusat kebudayaan atau kesehatan akan didirikan, berapa jumlah mesjid atau gereja akan dibangun demi peningkatan kehidupan spirituil, dan berapa jumlah sekolah dari masing-masing tingkatan harus dibangun. Pada akhirnya perhitungan semacam itu lebih bersifat ekonomis yang menyangkut pembiayaan tanpa jelas tujuan yang sebenarnya hendak dicapai. Bahkan perencanaan dalam bidang pendidikan khususnya persekolahan akan banyak berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang akan ikut menentukan jumlah dan macam tenaga kerja yang akan diperlukan. Ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa tujuan pendidikan semata-mata adalah menciptakan tenaga kerja, tetapi toh itu merupakan sebagian daripada tujuan pendidikan yang harus dicapai dalam rangka keseluruhan tujuan pembentukan manusia seutuhnya.

Atas dasar itu kiranya tidak cukup feasible untuk mengalihkan prioritas pembangunan pada bidang-bidang non-ekonomis. Dan atas dasar pemikiran yang serupa nampaknya tidak workable pula untuk menyusun rencana-rencana pembangunan dalam masing-masing bidang non-ekonomis apabila rencana-rencana demikian tidak dikaitkan dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan ekonomi sebagai pegangan dan pedoman dalam mana dapat ditentukan secara lebih nyata sasaran-sasaran perbaikan dan kemajuan. Sudah barang tentu pada akhirnya taraf kesejahteraan materiilpun sukar diukur dengan angka-angka, oleh karena kesejahteraan materiilpun, apalagi spirituil, adalah sesuatu yang bersifat relatif dan subyektif. Akan tetapi sekurang-kurangnya dalam bidang materiil dapat ditentukan tahap-tahap yang lebih jelas.

Oleh karena itu nampaknya alternatif yang paling workable adalah menורותkan dan meningkatkan pembangunan nasional dengan tetap mengutamakan bidang ekonomi, akan tetapi sementara itu pembangunan dalam bidang-bidang lain mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada yang sudah-sudah. Ini mengandung arti bahwa lebih besar dana harus disediakan untuk pembiayaan pembangunan dalam bidang-bidang ini mungkin tanpa hasil-hasil



yang nyata kelihatan seperti hasil-hasil dalam bidang ekonomi, sehingga dari segi ekonomis sepiantas lalu mungkin kelihatan sebagai pemborosan dana seperti untuk menyalurkan partisipasi yang lebih aktif kelompok-kelompok masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan, untuk saluran komunikasi yang lebih terbuka, dan meluaskan dan meningkatkan berbagai bentuk penyuluhan dan pendidikan dalam berbagai bidang. Pembangunan dalam bidang-bidang itu sangat penting untuk menunjang pembangunan ekonomi dalam arti bahwa tidak saja sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tidak akan mudah tercapai tanpa pembangunan dalam bidang-bidang non-ekonomis itu, tetapi juga bahwa pembangunan yang bersamaan dalam bidang-bidang lain itu akan memungkinkan berkembangnya kemampuan masyarakat untuk menampung akibat-akibat kemajuan ekonomi yang dinikmatinya dan sekaligus menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi sampai seminimum mungkin akibat-akibat negatif yang mungkin timbul karena kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi. Tanpa sasaran pembangunan ekonomi akan sukar dicapai, dan walaupun tercapai, akan banyak kehilangan nilai dan artinya oleh akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat untuk menampungnya, karena adanya suatu "cultural lag" atau kelambatan budaya.

Kita telah merasakan akibat daripada derap kemajuan ekonomi yang tidak diimbangi oleh tingkat yang memadai daripada kemajuan dalam bidang-bidang sosial, politik, budaya dan mental. Sebagai contoh yang sangat sederhana dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi yang dapat dinikmati berkat adanya kemajuan ekonomi telah membuat lebih banyak orang memiliki alat-alat teknologi modern. Tetapi oleh karena kurangnya peningkatan dan perkembangan sikap-sikap mental tertentu yang harus membarengi kemajuan teknologi dan ekonomi, seperti rasa tanggung jawab terhadap kepentingan dan ketertiban umum, rasa hormat terhadap hak-hak orang lain, dan sebagainya, maka penggunaan alat-alat semacam itu atau cara-cara menikmati hasil-hasil kemajuan tadi menimbulkan masalah-masalah sosial baru seperti gangguan terhadap ketenteraman umum dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dengan berbagai akibatnya yang negatif.

Peningkatan pembangunan dalam bidang-bidang non-ekonomis tentu saja akan melibatkan ahli-ahli perancang lain di samping ahli-ahli ekonomi, tetapi yang akan tetap mempergunakan



sasaran-sasaran dalam rencana pembangunan ekonomi sebagai petunjuk dan pedoman, sehingga segala perencanaan pembangunan dalam bidang-bidang itu tetap merupakan bagian integral daripada rencana pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh atau komprehensif meskipun sekali lagi dengan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi sebagai intinya. Di sinilah diperlukan kerjasama yang erat antara perencanaan-perencanaan ekonomi dan perencanaan-perencanaan sosial, politik, dan budaya. Dalam hubungan ini kiranya perlu diyakini bahwa tidaklah berfaedah dan tidak relevant sebenarnya untuk mempersoalkan siapakah yang lebih penting peranannya dalam kerjasama itu, atau bidang mana yang lebih penting dalam pembangunan nasional kita, sebab semuanya penting dan saling menunjang, saling melengkapi, dan saling mengisi. Begitu pula orang-orang yang terutama bergerak dalam bidang-bidang politik dan sosial-budaya tidak perlu mengada-ada dan tersinggung pride dan rasa kehormatannya apabila dikatakan bahwa pembangunan dalam bidang-bidang itu ditujukan untuk "menunjang" pembangunan ekonomi, oleh karena pada gilirannya kemajuan ekonomi pasti akan menunjang pula pembangunan dan kemajuan dalam bidang-bidang lain. Sebenarnya tidak berfaedah atau relevant pula mempersoalkan bidang mana dulu yang harus menunjang bidang apa. Meskipun dikatakan bahwa pembangunan dalam bidang-bidang lain adalah untuk menunjang pembangunan ekonomi, untuk memulai suatu pembangunan ekonomipun diperlukan titik tolak suatu taraf sosial budaya tertentu sebagai penunjang yang memungkinkannya, begitu pula sebaliknya dalam hal pembangunan dalam bidang-bidang non-ekonomis yang memerlukan titik tolak suatu kemampuan ekonomi tertentu.

Alhirnya perlu dikemukakan bahwa bukan saja dalam hal pembangunan ekonomi, tetapi lebih-lebih khususnya dalam bidang-bidang sosial, politik, budaya dan mental, serta dalam mengejar kelambatan budaya kita tentu tidak dapat semata-mata menggantungkan diri pada usaha-usaha pemerintah. Pemerintah dengan rencana pembangunannya dapat menyediakan kesempatan dan sarana-sarananya yang diperlukan, tetapi apakah kita masing-masing mau berusaha secara sadar mengembangkan dan meningkatkan dalam diri kita masing-masing sikap-sikap mental tertentu untuk menyongsong dan mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan sehingga dengan demikian masing-masing dan secara bersama-sama kita mulai dengan diri kita sendiri mempertebal rasa tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan dan ketertiban umum, menanamkan disiplin dalam diri kita sendiri dan

di lingkungan kita sendiri, rasa hormat terhadap hak-hak orang lain, toleransi, tenggang rasa, menjauhkan diri dari perbuatan korup dan melanggar hukum? Apakah kita sanggup mengembangkan dalam diri kita sendiri masing-masing suatu sikap mental pembangunan lengkap yang diperlukan dengan mendidik diri sendiri dan membudayakan diri secara terus-menerus? Sungguh suatu tantangan bagi kita semua dari segala lapisan masyarakat.



# AKIBAT-AKIBAT DARI TERLAMBATNYA PROSES PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

A.M.W. PRANARKA

Apabila peringatan hari pendidikan nasional ini disambut dengan judul pemikiran di atas, bukanlah maksud kami untuk mendramatisir situasi pendidikan di negara kita dewasa ini. Adalah menjadi maksud kami untuk mengajak melihat adanya kemungkinan riil di atas dan mengajak mengadakan sedikit analisa mengenai akibat-akibat yang dapat timbul dari kenyataan itu. Masalahnya adalah cukup penting untuk diperhatikan.

Kita kiranya harus cukup realistis dalam meninjau dunia pendidikan di negara kita ini. Pendidikan merupakan satu medan di mana bertemu tegangan antara harapan dan kekhawatiran. Adalah satu kenyataan bahwa kita menginginkan terjadinya proses pembaharuan pendidikan. Akan tetapi adalah kenyataan juga bahwa kita melihat proses tersebut semakin menjadi melamban dan bahkan semakin terasa kurang jelas dan menentu. Kita beralih dari suasana akselerasi (percepatan pembaharuan) ke dalam suasana retardasi (pelambanan pembaharuan). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan yang kita adakan di dalam persuratkabaran, di lingkungan departemen dan di lingkungan masyarakat luas umumnya.

Sesungguhnya proses pelambanan itu sudah terjadi menjelang tahun-tahun terakhir dari PELITA I. Memang tahapan pertama dari periode PELITA I telah dapat melotakkan garis-garis besar politik pendidikan di negara ini, akan tetapi sesudahnya harus melangkah lebih maju memasuki perencanaan yang lebih detail, terjadilah proses pelambanan tersebut.

Bila kita adakan analisa, maka ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya proses pelambanan itu. Misalnya saja: (1) adanya dilema-dilema yang belum terpecahkan dalam tahap formulasi dari politik pendidikan. (2) Adanya kontroversi dan konflik-konflik baik yang berlatar belakang politis, ideologis maupun akademis, yang menjadi berlarut-larut. (3) Adanya infrastruktur pendidikan yang semakin merapuh, antara lain sistem

monojean pendidikan, keadaan guru dan administrator pendidikan yang kurang memadai. (4) Terjadinya proses informasi yang meluas mengenai pembaharuan pendidikan akan tetapi tidak disertai dengan proses persepsi mengenai masalah pendidikan itu sendiri. (5) Masyarakat kita, untuk sungguh-sungguh berkembang maju, ternyata memerlukan proses pedagogis (atau proses agogis) yang cukup radikal dalam beberapa aspek.

Yang kami namakan sebagai dilema-dilema di dalam formulasi konsepsional politik pendidikan di negara ini misalnya saja antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif; antara pendekatan ekonomis dan pendekatan non-ekonomis. Dilema-dilema tersebut ternyata berkait juga dengan formulasi konsepsional tentang pembangunan masyarakat Indonesia ini sendiri. Tentang kontroversi politik ataupun ideologis kiranya sangat jelas.

Sejak lama sudah terjadi bahwa medan pendidikan di negara ini juga menjadi medan konflik-konflik politik, konflik-konflik ideologis. Tetapi pada akhir-akhir ini terdapat tipe kontroversi lain, ialah kontroversi akademis, khususnya dalam usaha merencanakan pola pendidikan itu. Hal ini tentulah sangat dapat menghasilkan buah-buah perkembangan. Akan tetapi sementara itu terjadi bahaya bahwa masalah pendidikan tidak lagi menjadi masalah gerakan pembaharuan sosial di masyarakat ini melainkan semata-mata tinggal menjadi masalah diskusi-diskusi. Tentang hambatan-hambatan lain kiranya tidak perlu diuraikan panjang lebar pada kesempatan ini. Tetapi satu catatan adalah sangat penting ialah bahwa untuk proses pembangunan sosial, masyarakat kita memerlukan adanya satu strategi pendidikan yang radikal. Salah satu kunci dari berhasilnya proses pembangunan adalah terjadinya proses the will to develop di dalam masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk subjective will maupun dalam suasana collective will. Hal ini yang harus kita perhatikan. Dan melotakkan the will to develop tersebut, kiranya itulah fungsi utama dari pendidikan, sementara sesudah itu dilongkapi-lah dengan pembinaan nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan, serta kemampuan mengadakan komunikasi baik sosial maupun ekologis, sehingga manusia-manusia mampu membudayakan masyarakat dan alamnya.

Berangkat atas dasar pertimbangan tersebut telah dirumuskan beberapa kerangka pokok dalam politik pendidikan di Indonesia, seperti misalnya: perlunya satu manajemen pendidikan nasional; dan perlunya sistem pendidikan yang diintegrasikan dengan



pembangunan. Tetapi rumusan tersebut belum membawa proses yang secara lebih jelas menunjukkan arah maupun pola politik pendidikan di negara ini.

Apakah akibat-akibat yang bakal terjadi bila proses keterlambatan ini tidak teratasi? Kita semua tahu bahwa politik pembaharuan pendidikan ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam perkembangan sejarah bangsa dan masyarakat kita ini. Hal ini mungkin akan lebih menjadi jelas apabila politik pembaharuan pendidikan ini kita tempatkan dalam konteks Orde Baru.

Orde Baru sebagai satu gerak yang ingin mengadakan pembaharuan dan pembangunan di masyarakat ini, dengan sendirinya pasti harus berhadapan dengan masalah pendidikan. Sebab pada akhirnya Orde Baru adalah "Perubahan sikap mental, cara berpikir dan cara kerja", demikianlah ditegaskan oleh Presiden Soeharto. Dan tepatlah formulasi itu. Terutama karena pada akhirnya berhasil tidaknya Orde Baru dan segala cita-citanya itu tergantung pada faktor manusia Indonesia, penduduk Indonesia, rakyat Indonesia. Manusia adalah selalu merupakan kekuatan yang strategis di dalam proses pembaharuan dan pembangunan sosial. Dengan berdasarkan kenyataan ini maka jelas bahwa politik pendidikan harus memperhatikan segi relevansinya (mewujudkan sistem pendidikan yang membuat manusia menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan dan tuntutan perkembangan), memperhatikan segi kualitatif (mengembangkan di dalam manusia Indonesia kualitas-kualitas yang diperlukan guna perkembangannya), memperhatikan segi kuantitatif (supaya sebanyak dan semerata mungkin manusia-manusia Indonesia menjadi kekuatan strategis yang riil), dan memperhatikan segi efektifitas maupun efisiensi (terutama mengingat sumber-sumber yang terbatas sementara jumlah penduduk berkembang dan tuntutan perkembangan sosial baik secara nasional, regional maupun internasional semakin besar dan semakin mendesak).

Dengan demikian jelas bahwa apabila terjadi keterlambatan di dalam gerak politik pembaharuan pendidikan, maka hal tersebut membawa serta akibat-akibat di dalam keterlambatan proses Orde Baru, proses pembaharuan dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut adalah sangat gawat nantinya. Perlu dikemukakan satu kenyataan bahwa dengan memasuki tahap perencanaan teknokratis dari pembangunan sosial, maka tidak jarang orang

menjadi semakin lepas dari konteks dasar-dasar pembaharuan dan arah perjuangan masyarakat. Dalam hal ini lepas dari konteks dasar pembaharuan dan pembangunan Indonesia ini, yang adalah Konstitusi dan Pancasila. Semakin kita masuk ke dalam diskusi-diskusi akademis, semakin ada bahaya terjauh dari konteks dasar tersebut, dengan akibat bahwa politik pendidikan dan perencanaan pendidikan juga menjadi semakin menjauh dan melepas dari konteks dasar itu. Akibatnya adalah jelas: karena pendidikan langsung berkenaan dengan pembinaan manusia, maka dapat terjadilah satu bahaya semakin terlepasnya manusia Indonesia ini dari konteks cita-cita dasarnya yakni cita-cita Pancasila dan UUD 45.

Soal lain lagi perlu dicatat adalah: masalah pentingnya pendidikan luar sekolah. Memang politik pendidikan dewasa ini telah menggariskan untuk menerima satu konsep pendidikan yang luas. Pendidikan tidak diindentifikasikan dengan sekolah. Maka pendidikan disalurkan melewati medan sekolah dan medan pendidikan luar sekolah. Hal ini memang sangat tepat, terutama karena pendidikan harus bergerak dalam pembinaan potensi manusia. Yang terpenting sekarang ialah ditemukannya cara-cara melaksanakan sistem pendidikan tersebut. Dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan tersebut sangat berdekatan dengan konsep kepemimpinan. Itulah sebabnya maka bukan lagi konsep pedagogi melainkan konsep agogi (pedagogi berarti memimpin anak-anak; agogi berarti memimpin semuanya). Hal ini membawa implikasi bahwa pola kepemimpinan di masyarakat kita harus juga menjadi pola yang edukatif. Ini berarti bahwa para pemimpin di dalam masyarakat ini benar-benar merupakan pembudayaan dari sikap, nilai, serta segala perlengkapan manusia Indonesia untuk mengembangkan diri dan masyarakatnya. Kiranya bila hal ini terjadi, maka sungguh-sungguhlah dapat terjadi satu proses akselerasi. Akan tetapi ini membawa implikasi bahwa di kalangan para pemimpin itu sendiri perlu terjadi satu proses pendidikan. Keterlambatan di dalam proses pembaharuan pendidikan dengan demikian juga dapat membawa akibat pada kenyataan ini: di samping masyarakat kurang cepat disiapkan untuk merubah diri dan membangun, maka di dalam masyarakat juga kurang disiapkan pemimpin-pemimpin yang memang menghayati proses dinamisasi sosial yang diperlukan masyarakat kita untuk maju, untuk membangun. Hal ini bisa mengakibatkan lingkaran setan antara masalah proses pembaharuan dan pembangunan dari atas atau dari bawah.



Selanjutnya kita tentu saja akan dapat melihat akibat-akibat lainnya lagi. Misalnya saja akibat terlambatnya perencanaan dan pengorbanan tenaga kerja.

Kelambanan-kelambanan di dalam usaha mengembangkan tenaga-tenaga kerja ini, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, tentu saja secara langsung perhatian ditujukan pada pemecahan strategi mikro. Dan sehubungan dengan ini maka konstruksi kurikulum adalah sangat penting.

Adalah sangat simbolis bahwa hari pendidikan nasional ini segera akan disusul dengan hari kebangkitan nasional! Sejarah nasional kita menunjukkan bahwa proses kemerdekaan nasional Indonesia ini tercapai melalui proses kebangkitan nasional yang lahir dari proses pendidikan. Dan terjadilah di dalam proses itu satu triadis: Pendidikan - Kebangkitan Nasional - Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan adalah tugas kita sekarang melanjutkan proses tersebut dengan menyusun satu triadis baru: Kemerdekaan Republik Indonesia - Pendidikan - Kemajuan-kemajuan ke arah perwujudan satu Indonesia baru: Indonesia yang lebih bersatu, lebih bekerja, lebih membangun, lebih maju dan lebih sejahtera.





## KELAKUAN YANG MENYIMPANG TIDAK SELALU BERSIFAT NEGATIF

Onny S. PRIYONO

Suatu masalah sosial dapat dibagi atas 2 kelompok, yang pertama digambarkan sebagai disorganisasi sosial dan yang kedua sebagai kelakuan yang menyimpang. Akan tetapi ini hanya merupakan suatu penggambaran analitis.

Apabila membicarakan mengenai kelakuan yang menyimpang, maka pertama-tama haruslah dibedakan terlebih dahulu antara ketidakpenyesuaian sosial dan penyimpangan. Ketidakpenyesuaian sosial adalah bentuk penyimpangan yang tidak diinginkan, sedangkan di dalam penyimpangan terdapat bentuk-bentuk penyimpangan yang diinginkan, jadi penyimpangan meliputi juga beberapa bentuk dari ketidakpenyesuaian sosial.

Robert J. Havighurst mengemukakan 3 macam penyimpangan yang dapat dianggap sebagai penyimpangan yang umum:

### 1. Bentuk-bentuk penyimpangan yang tidak diinginkan:

Bentuk-bentuk penyimpangan yang pada umumnya tidak disetujui adalah yang dipandang sebagai subversif terhadap yang telah ada dan sistem sosial yang telah diterima, atau sebagai ciri daripada kekurangan atau kegagalan pribadi, misalnya: (1) Kelakuan agresif yang bermusuhan: terhadap orang lain atau masyarakat dan milik pribadi. Ini biasanya merupakan bentuk kenakalan remaja yang paling sering dilakukan; (2) Mencuri: dapat merupakan kelakuan yang bermusuhan. Ada beberapa motif pencurian, akan tetapi pada dasarnya perbuatan tersebut tidak diharapkan; (3) Hamil di luar perkawinan: Ada 2 bentuk yang berbeda, yaitu (a) Seorang ibu yang masih remaja dianggap menyimpang oleh karena usianya yang masih sangat muda; (b) Sedangkan seorang ibu yang berumur 20 atau 30 tahun di mana pada umur tersebut dianggap sudah pantas untuk mendapatkan anak. Akan tetapi kedua-duanya menyimpang di dalam memperoleh anak di luar perkawinan yang sah; (4) Kelakuan yang menyendiri: ini lebih sering terdapat di antara wanita daripada pria. Kelakuan tersebut biasanya malu-malu, menyendiri dan ragu-ragu. Orangnya pendiam sekali dan tidak menonjolkan diri sehingga ia

jarang memperoleh perhatian; (5) Kelakuan psikotik: dipandang sebagai tidak bermanfaat bagi masyarakat dan mungkin membahayakan; (6) Kelakuan neurotik: kebanyakan dari bentuk ini tidak diinginkan akan tetapi ada norma-norma yang diterima masyarakat, misalnya kompulsif yang mengkhawatirkan kelakuan di sekolah dan kompulsif kebersihan, yang dianut oleh individu dalam bentuk yang ekstrim; (7) Cacat jasmaniah: seperti buta, epilepsi dan sebagainya yang kesemuanya tidak diinginkan karena merupakan cacat daripada seseorang. Di samping itu juga sering mengkhawatirkan orang lain; (8) Penampilan yang menjijikkan: adalah ciri-ciri jasmaniah yang diinterpretir sebagai sesuatu yang menjijikkan, oleh karena itu tidak diinginkan. Misalnya kotor, potongan pakaian yang tertentu, bentuk tubuh yang terlalu gemuk atau terlalu kurus.

## 2. Bentuk-bentuk penyimpangan yang diinginkan

Pada umumnya adalah kelakuan atau penampilan yang memberikan kesejahteraan sosial dan perasaan yang menyenangkan bagi orang yang bersangkutan. Misalnya: (1) Kepintaran yang luar biasa di sekolah; (2) Daya cipta dalam seni; (3) Mempunyai ketangkasan dalam suatu bidang, misalnya dalam olah raga; (4) Memiliki kecantikan atau bentuk tubuh yang indah. Pada umumnya bentuk-bentuk penyimpangan yang diinginkan menunjukkan kepada perbaikan sosial atau individu. Dan karena pembangunan dan perkembangan (atau perubahan dan inovasi) diinginkan oleh masyarakat maka penyimpangan yang menuju ke arah ini diinginkan.

## 3. Bentuk-bentuk penyimpangan yang bersifat ganda

Masyarakat menghadapi suatu kesulitan di dalam memecahkannya mengingat bentuk-bentuk kelakuan tersebut: (1) Wanita yang memiliki sifat kelaki-lakian: Apabila di dalam masa kanak-kanak seorang wanita memiliki sifat kelaki-lakian maka mungkin ia dipandang sebagai orang yang berani, akan tetapi apabila ia sudah lebih dewasa maka orang akan berpandangan lain terhadapnya; (2) Laki-laki yang memiliki sifat kewanitaan atau yang tertarik kepada hal kewanitaan: Apabila di dalam masa kanak-kanak seorang laki-laki bermain dengan boneka maka ini dipandang sebagai sikap yang montolerir akan tetapi apabila ia telah dewasa dan berbicara serta berkelakuan sebagai wanita maka ini dipandang sebagai penyimpangan yang tidak diinginkan. Yang tidak begitu



ekstrem adalah mempunyai minat terhadap sastra, kesenian atau musik, yang kurang menunjukkan sifat kejantanan yang oleh masyarakat dipandang bersifat ganda; walaupun masyarakat akan lebih menghargai pada tingkat usia yang lebih lanjut; (3) Sikap sosial yang kritis: Bagi orang-orang muda ini merupakan hal yang normal apabila mengkritik orang-orang tua dan apa yang telah dilembagakan, akan tetapi generasi yang lebih tua tidak dapat menerima sikap ini yang dianggapnya sebagai tindakan protes; (4) Menyendiri ("privatist" atau kelakuan "beatnik"): Ada suatu bentuk tingkah laku sosial yang ternyata tumbuh di kalangan remaja di mana mereka dengan sengaja menjauhkan diri dari tanggung jawab untuk turut serta dalam aktivitas politik dan sosial yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Havighurst mengemukakan suatu pembagian atau tipologi yang agak luas mengenai penyimpangan, yang terdiri atas:

1. Bentuk-bentuk penyimpangan yang tidak diinginkan.
2. Bentuk-bentuk penyimpangan yang diinginkan.
3. Bentuk-bentuk penyimpangan yang bersifat ganda.

Walaupun pembagian ini agak luas akan tetapi pembagian ini dapat berguna di dalam mendiagnose dan pemberian treatment ataupun therapy bagi yang membutuhkannya. Suatu tipologi mengenai penyimpang besar artinya bagi pekerjaan sosial terutama dalam mendekati penyimpang sehingga dapat diberikan therapy atau treatment yang sesuai dengan kebutuhannya dan juga mempermudah di dalam mendiagnosenya. Ada bermacam-macam pandangan serta definisi mengenai kelakuan yang menyimpang. Di antaranya ada yang memandangnya secara statistis yaitu bahwa kelakuan yang menyimpang adalah apa yang menyimpang daripada rata-ratanya. Ini dapat menimbulkan kekaburan apabila mayoritasnya adalah penyimpang, yang merupakan salah satu kelemahan daripada pandangan ini.

Pendapat lain memandangnya sebagai gejala patologis, yaitu sebagai suatu penyimpangan yang "tidak sehat" daripada norma kelakuan yang universal, atau sebagai suatu "penyakit". Inipun sulit untuk menentukan apa yang merupakan kelakuan yang "sehat" dan "tidak sehat" karena norma adalah relatif dan ada beberapa norma di mana pelanggaranannya dapat bersifat universal.

Pendapat sosiologis yang lain menggambarkan penyimpangan sebagai kegagalan untuk menaati peraturan kelompok. Ini lebih mudah karena apabila suatu peraturan di mana kelompok telah



menentukan para anggota untuk memaatinya maka dengan mudah dapatlah dikatakan apakah seseorang telah melanggarnya sehingga dipandang sebagai penyimpang. Definisi yang umum mengenai kelakuan yang menyimpang menurut William A. Rushing, yang menyatakan bahwa dalam pengertian yang umum, kelakuan yang menyimpang adalah kelakuan yang melanggar norma-norma kelompok peraturan dan kode tingkah laku yang diharapkan ditaati oleh anggota kelompok.

Masyarakat yang menentukan apakah suatu kelakuan bersifat menyimpang atau bukan. Apakah suatu perbuatan itu menyimpang tergantung juga bagaimana reaksi orang lain terhadapnya. Marshall B. Clinard dan Howard S. Becker memberi batasan kelakuan yang menyimpang sebagai reaksi daripada masyarakat serta lembaga pengontrolan sosial. Sehingga untuk mewujudkan suatu kelakuan yang menyimpang maka pertama-tama suatu tindakan haruslah diketahui terlebih dahulu oleh orang lain, dan kedua adanya reaksi daripada lembaga pengontrolan sosial baik secara formal ataupun informal. Jadi kelakuan yang menyimpang merupakan respons daripada anggota masyarakat yang konvensional dan taat, yang menganggap serta menginterpretir kelakuan tersebut sebagai menyimpang. Respons masyarakat di dalam menyatakan suatu perbuatan sebagai menyimpang tergantung antara lain kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan waktu, apa yang sekarang dianggap menyimpang mungkin kelak tidak demikian lagi.
2. Siapa yang melakukannya dan siapa yang merasakannya.
3. Tergantung kepada sifat perbuatan tersebut yaitu apakah melanggar suatu peraturan.
4. Oleh karena "menyimpang" menunjukkan kelakuan yang melanggar sehingga yang dipelajari hanyalah yang disebut demikian. Dengan demikian sebelum suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai menyimpang maka haruslah diketahui terlebih dahulu bagaimana respons masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

Becker mempergunakan istilah "orang luar" (outsiders) bagi mereka yang oleh masyarakat dinyatakan sebagai penyimpang, seolah-olah mereka berada di luar suatu lingkaran "normal" daripada anggota kelompok. Akan tetapi istilah "orang luar" ini sebenarnya dapat ditinjau dari dua sudut, dari sudut mereka yang disebut penyimpang mungkin orang-orang yang membuat peraturan yang menyatakan mereka sebagai bersalah atau melanggar, adalah justru "orang luar".



Reaksi masyarakat terhadap suatu penyimpangan norma berbeda dalam hal apakah penyimpangan tersebut disetujui, ditolerir atau ditolak. Penyimpangan-penyimpangan tersebut juga berbeda dalam intensitas daripada reaksi masyarakat terhadap penyimpangan tersebut, maupun dalam kecenderungan untuk menyetujui atau untuk menolaknya. Reaksi masyarakat atau untuk menyatakan suatu tingkah laku sebagai kelakuan yang menyimpang merupakan aspek yang penting dalam mempelajari kelakuan yang menyimpang. Penyimpangan dari norma-norma yang ditolerir atau yang menimbulkan sedikit sekali tantangan hanya sedikit mengkhawatirkan masyarakat. Hanya penyimpangan-penyimpangan di mana tingkah laku tersebut oleh sebagian terbesar masyarakat ditolak merupakan kelakuan yang menyimpang.

Apakah suatu tindakan atau kelakuan menyimpang, ini adalah relatif sekali oleh karena norma sosial berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, dari waktu ke waktu, dan dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain dalam masyarakat. Apa yang mungkin dianggap menyimpang bagi suatu kelas sosial atau kelompok agama mungkin merupakan hal yang wajar bagi kelompok yang lain. Adalah penting bagi seorang individu untuk menentukan apakah suatu penyimpangan norma itu baik atau buruk bagi dirinya serta masyarakat. Beberapa pertimbangan yang lain harus diperhatikan juga apabila masyarakat menolak atau menentang suatu kelakuan yang menyimpang, hal tersebut juga tergantung kepada situasi dan sampai di manakah masyarakat dapat mentolerir kelakuan tersebut. Apakah seseorang dinyatakan sebagai penyimpang atau bukan, tergantung juga kepada faktor-faktor seperti kelas sosial, pekerjaan, ras dan suku bangsa, umur, penyimpangan-penyimpangan yang pernah dilakukan pada masa lampau, situasi dari mana kelakuan tersebut timbul, tekanan-tekanan reaksi publik, sarana-sarana yang ada untuk menangani orang-orang yang menyimpang.

William W. Wattenborg mengemukakan bahwa ciri-ciri daripada kelakuan yang menyimpang yang ditolak oleh masyarakat atau yang dianggap sebagai tidak baik adalah sebagai berikut ini:

1. Yang menyebabkan kerusakan bagi orang dan harta benda.
2. Yang melanggar **pantangan** (taboos).
3. Yang melanggar peraturan yang diterima umum.
4. Yang merusak kemampuan untuk berpartisipasi secara sosial.

5. Kelakuan yang ditampilkan oleh orang-orang yang bingung mengenai norma atau yang terasing dari pergaulan sosial.

Berdasarkan patokan tersebut di atas yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, maka akan lebih mudahlah untuk menentukan apakah suatu kelakuan atau perbuatan merupakan kelakuan yang menyimpang.







